

	“Meeting Notes Sesi 1” (Pk. 13.00-15.00 WIB)		Tanggal Laporan:
	Lokasi: Tempat Masing-Masing	Tanggal: 8 Mei 2020	
Notulen: Mohamad Yusuf Project Office:	Perihal: Diskusi Bulanan		Distribution: Peserta Rapat

Sesi Pertama

Moderator

Shabia

Assalamualaikum Wr Wb, selamat siang, terima kasih kepada para pembicara dan bapak dan ibu peserta yang telah bergabung. Jadi IRE setiap bulannya dalam upaya untuk menghimpun diskusi bersama. Biasanya mengadakan diskusi dengan tema-tema tertentu Dan biasanya dilakukan secara langsung di Joglo Winasis. Namun karena ada Pandemi Covid-19 sebagaimana dengan institusi lain yang menyelenggarakan seminar dengan daring, diskusi bulanan kali ini dilakukan secara daring. Dan ini pertama kalinya IRE melakukannya secara daring semoga diskusi ini juga dapat dilakukan untuk bulan depan juga. Tetapi tentunya kami berharap Pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga diskusi dapat dilaksanakan secara langsung kembali. Diskusi ini akan berlangsung dari pukul 13:00 dengan tema Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Responsif Covid-19. Teknis diskusi selama pemaparan dari pembicara, peserta akan di matikan suaranya dan video. Namun nati saat sesi tanya jawab, dapat dilakukan pada kolom komentar yang ada di Zoom dan Facebook. Tiga pembicara akan menyampaikan materinya, pertama akan disampaikan Pak Kurniantoro, kedua, Mas Sugeng dan ketiga, Pak Sukasmanto.

Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat masing-masing pembicara. Pak Kurniantoro merupakan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Bantul. Beliau telah banyak berkiprah dalam pemerintahan level kabupaten. Dan seperti yang kita tahu bagian administrasi pemerintahan desa, mengepalai dan bertanggung jawab atas sub bagian lain seperti administrasi pemerintahan desa, lembaga desa dan pengelolaan keuangan desa. Pak Kurniantoro akan banyak menceritakan pengalamannya di level kabupaten. Sementara itu pembicara kedua, Mas Sugeng merupakan Kepala Seksi Kemasyarakatan Pemerintah Desa Karang Sari, Kabupaten Kulon

Progo. Beliau saat ini juga merupakan relawan desa Covid-19 di Desa Karangsari. Pengalamannya ini akan dipaparkan kepada kita. Dan ketiga, Pak Sukasmanto merupakan peneliti IRE sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, yang berfokus pada isu-isu manajemen keuangan, pengelolaan keuangan, aset desa, ekonomi desa. Pengalaman beliau juga akan dipaparkan kepada kita semua.

Selanjutnya ketiga pembicara akan memaparkan materinya. Seperti yang kita tahu diskusi kali ini akan membahas perencanaan dan penganggaran desa yang responsif Covid-19. Kemarin kita telah melihat Pandemi Covid-19 ini, sudah ditetapkan sebagai darurat nasional dan sudah berlangsung selama dua bulan. Kemudian, desa pun menjadi sorotan banyak pihak karena ada laju migrasi dari kota ke desa. pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran No.8 direvisi No. 11 Tahun 2020, Permen 11, 2019 juga sudah direvisi Permen PDPT No. 6 tahun 2020. Dan salah satu isinya kita tahu terdapat bansos BLT, (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). lantas kita ingin mengetahui dalam tataran normatif sudah ada peraturan seperti itu, kemudian bagaimana peraturan dan surat edaran tersebut dipraktikkan menjadi aksi yang bisa menanggulangi dampak negatif Covid-19. Pertama kita akan mendengar pemaparan dari Pak Kurniantoro, bagaimana kabupaten telah mengeluarkan kebijakan, terutama dalam sisi APB desa, silakan.

Kurniantoro

Selamat siang bapak dan ibu yang saya hormati, tentu salam sehat untuk semuanya semoga terhindar dari Covid-19. Terkait dengan covid-19 dalam perencanaan ini, sebelum saya masuk ke sana. Perlu kami berikan gambaran bahwa tentu ada perbedaan perencanaan pada kondisi normal dan kondisi yang darurat. Tetapi pada prinsipnya bahwa untuk Bantul, sebelum surat edaran keluar. Kita sudah bertindak terkait penanganan Covid-19. Jadi sejak sesudah tanggal 20 keluarnya SE No.8 maupun 11, sebelum tanggal ini sudah ada tanggap darurat. Kemudian desa memiliki pertanyaan desa ini harus bagaimana? Situasinya sudah berbeda, saat itu sudah ada kepanikan di masyarakat. Pertama kali anggaran tidak terduga terkait bencana itu dapat digunakan untuk menangani Covid-19. Karena banyak desa yang belum berani menggunakan anggaran itu. kemudian kami buat surat edaran, silakan digunakan anggarannya. Kalau kemudian anggaran untuk penanganan bencana itu kurang silakan dengan perubahan pencabaran yang dilakukan oleh pemerintah desa, menggeser anggaran-anggaran lain yang dianggap tidak penting. Dalam arti untuk mendapatkan anggaran secara cepat.

Kemudian baru setelah itu, setelah desa bisa memenuhi kebutuhan untuk daruratnya. Baru kemudian muncul SE No.8 2020 dari Kemendes PDT. Dalam kajian kami bahwa SE itu sebenarnya terutama terkait dengan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) itu kami tidak ada masalah. Karena di penganggaran kami di Bantul sampai saat ini masih menggunakan PKTD, jadi untuk yang pembangunan itu sudah jelas. Kami tidak perlu mengganti. Kemudian terkait dengan penyediaan hunian untuk menampung dan membentuk relawan untuk penanganan Covid-19. Itu kemudian ditindak lanjuti oleh desa dengan membentuk relawan. Tetapi terkait dengan hal ini ada kebingungan dari desa ketika kemudian semuanya diminta untuk membuat tempat penampungan. Karena pada saat itu, sebagian besar desa belum merasakan dampak dari Covid-19. Sehingga mereka kebingungan harus tetapi kemudian yang dilakukan adalah desa menunjuk atau mencari calon-calon lokasi untuk tempat untuk dipakai sebagai ruang isolasi. Tetapi terkait dengan penyediaan alat-alat belum karena saat itu belum tahu kalau nanti Covid-19 ini nanti akan berkembang sedemikian ini.

Justru yang dipertanyakan ketika itu adalah PKTDnya. Sekalipun kami di Bantul desa sudah menganggarkan PKTD. Tetapi yang menjadi pertanyaan di masa Covid seperti ini, saat orang harus tinggal di rumah justru ada perintah untuk ini. Sementara kami menginginkan PKTD itu dihentikan sementara. Karena ini gotong royong, kami sulit menjamin bahwa jaga jarak bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa ini jangan dulu. Sampai saat ini kami hentikan untuk PKTD dan kami fokus untuk diam di rumah. Kemudian juga untuk tidak ke mana-mana dan menjaga kesehatan. Terkait perintah untuk dilakukan kami juga belum melakukan. Karena dengan pergeseran anggaran atau pun dengan perubahan penjabaran APD desa kita bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Katakanlah mencukupi kebutuhan untuk darurat, justru desa belum tertarik perubahan APB desa. setelah ada Permen turun kemudian diwajibkan adanya pemberian BLT dll baru desa berpikir untuk dilakukan sesuai dengan perintahnya. Tetapi menjadi catatan pertama bila SE itu ditindak lanjuti dengan adanya perubahan APB desa untuk menggeser biaya yang tidak begitu besar ini. Justru setelah muncul perintah untuk BLT ini menjadi masalah karena APB desa yang sudah diubah ketika muncul perintah otomatis dilakukan perubahan lagi. Ini yang menjadi masalah, kami merasa beruntung justru sebelum perintah BLT itu.

Jadi dengan adanya Permen itu, kemudian PMD melakukan pendataan untuk

mempersiapkan. Pertama mengubah perubub terkait pengelolaan keuangan desa di mana perubahan APB desa hanya bisa diganti sekali kecuali keadaan bencana. Keadaan bencana ini yang kemudian kami jelaskan di dalam perubahan perubub tentang APB desa. kedua, terkait tentang dana desa itu sendiri. Kita harus mengubah karena ada rincian penggunaan untuk apa. Kemudian perubahan beberapa prosedur terkait dengan APB desa, ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya pembahasan oleh BPD itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 10-20 hari, kita minta untuk dilakukan secepatnya termasuk juga evaluasi dari camat. Tetapi prosedur itu tetap kami laksanakan sesuai dengan bagaimana kita melaksanakan perubahan hanya saja dipercepat. Tetapi tetap dilakukan musdes di ikuti oleh warga masyarakat, sehingga keputusan itu bukan keputusan pemerintah semata-mata tetapi juga warga masyarakat. Yang kemudian diselenggarakan oleh BPD. Mungkin untuk sementara itu, untuk penajaman nanti bisa dilakukan saat diskusi.

Shabia

Ok, jadi tadi Pak Kurniantoro sudah menceritakan sedikit dari mulai pertama Pandemi ini tersampaikan ke desa melalui surat edaran lalu ada Permendes. Tadi sempat dijelaskan pula bahwa ada keuntungan tidak mengubah APB desa karena nyatanya di Permendes juga ada perubahan dari segi BLT. Tetapi sebelum beralih ke Mas Sugeng boleh tahu pak, kalau misalnya di Bantul sendiri desa-desa yang sudah akhirnya mengusulkan perubahan APB desa ke kabupaten itu seberapa banyak? Atau masih dalam masa proses musyawarah desa.

Kurniantoro

Jadi begini, karena kemudian harus mengubah antar sub bidang di dana desa dan juga anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Dan yang pertama sekali terkait perubahan antar bidang tadi di mana itu tidak mungkin dilakukan melalui perubahan penjabaran. Maka kemudian semua desa melaksanakan perubahan APB desa dengan waktu yang berbeda tetapi bisa diselesaikan terakhir pada malam Senin kemarin. Kemudian minggu depan kita targetkan untuk yang perubahan APB desa sudah selesai kemudian BLTnya bisa dicairkan.

Shabia

Baik seperti yang di katakan Pak Kurniantoro kalau teman-teman ingin menanyakan dan merespons bisa langsung berikan komentar. Penajaman akan kita sama-

sama lakukan di tahap tanya jawab. Kali ini kit beralih dulu ke Mas Sugeng. Tadi Pak Kurniantoro sudah banyak menyampaikan kalau dari tingkat kabupaten sudah mengeluarkan Perbub. Kemudian ada juga himbauan kepada masyarakat desa untuk melakukan musyawarah meskipun harus tetap aman sesuai prosedur, tetapi tetap harus demokratis, inklusif. Mengingat situasinya membuat jarang terjadi pertemuan sehingga membuat ada suara-suara yang luput di desa. Sekarang kita jadi ingin tahu di dalam tataran desa seperti apa implementasinya. Dan bagaimana respons desa terkait dengan surat edaran Permendes silakan Mas Sugeng.

Sugeng

Selamat saing, terima kasih sekali karena berkesempatan berbicara di forum yang luar biasa ini. Bagaimana desa tanggap terhadap Covid-19, kami merasa siapa pun atau institusi di dunia ini tidak ada yang siap. Pertama Covid-19 itu kan ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2020 di Indonesia. Namun sebelumnya pada 11 Desember 2019 pak presiden di Jakarta mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana desa itu bisa membangun dari awal tahun. Saat itu pak presiden menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya bahwa desa-desa diharapkan se awal tahun mungkin melaksanakan pembangunan di desa tidak harus menunggu bulan Juli seperti biasanya. Pada tanggal 3 Februari, kami sudah ditransfer dari dana pusat dan kemudian teman-teman terus lari atas instruksi itu juga. Melaksanakan pembangunan termasuk PKTD. Setelah satu setengah bulan berjalan atau pertengahan bulan Maret, DD yang pertama sudah terserap 91,3% untuk kegiatan diantaranya PKTD, ada untuk kegiatan PAUD, Posyandu dan lain-lain. Yang itu masih belum berhenti di awal bulan Januari dan Februari.

Ini sebenarnya bencana buat kami ternyata karena harus ada perubahan. Sementara itu dananya sudah terserap 91% dari 60% dana desa yang sudah dikirim. Ini membuat kesulitan kami di desa. tetapi kami di desa sebelum ada Covid-19, menyusun APB desa 2019 ada salah satu kesulitan kekurangan sumber dana, khususnya desa-desa di Kulon Progo. Karena pada tahun 2020 kami menyesuaikan perangkat desa Standard 2A, namun dari pusat tidak disertakan anggaran penyertanya. Jadi menggunakan ADD yang sama, tidak ada kenaikan anggaran dari pusat tetapi harus menaikkan Siltap perangkat desa. yang itu hampir 100% karena 2A kami di Kulon Progo baru 1,3 menjadi 2, lebih artinya hampir 100%. Yang itu menggerogoti APB desa sangat besar. Seperti kami di Karang Sari yang memiliki jumlah perangkat desa yang besar. Sebelum ada Covid pun kami sudah kesulitan

di APB desa dan ini sudah mengurangi kegiatan-kegiatan di masyarakat.

Covid datang setelah kami melaksanakan PKTD 91% yang itu agak berat. Namun kami tetap merespons, pertama seperti Pak Kurniantoro tadi. Kami di desa yang pertama kami lakukan adalah menanggapi kepulungan teman-teman. Karena kami daerah pinggiran yang banyak warganya merantau dan banyak yang pulang. Sampai hari ini sudah ada 207 kepulungan perantau sampai hari ini. Di awa-awal kami memang mengondisikan pemudik yang menjadi salah satu pintu potensi penularan. Karena kekurangan anggaran dan kebutuhan mendesak kami membuat satu sistem bersama dengan teman-teman di Puskesmas untuk membuat form mudik dengan menggunakan Google form. Untuk mendata teman-teman yang akan pulang ke Karang Sari. Karena kami sudah memperkirakan jumlah kepulungan yang akan banyak. Pertama kami lakukan pada tanggal 27 Maret secara resmi sudah membuat grup terkait Satgas dan relawan, awalnya ada 22 orang. Setelah kepulungan pemudik kami mengarahkan untuk isolasi mandiri, artinya memberikan edukasi kepada. Dan ini tidak mudah karena sesuatu yang baru, sehingga membuat sangat sensitif sekali. Sebagian besar dari 207 hanya ada beberapa yang karantina terpadu yang dilakukan perusahaan untuk karyawannya. Karantina mandiri ini syukur belum ada penularan Covid-19 di Karang Sari.

Kedua, terkait edukasi yang sangat tidak mudah untuk disampaikan kepada masyarakat terkait Covid-19. Karena ini menimbulkan sensitivitas yang luar biasa. Kami ada kasus kepulungan dari salah satu pondok yang ada di Magetan, ketika kami ingin memberikan edukasi atau menyampaikan arahan untuk isolasi mandiri itu butuh pendekatan dari hati ke hati. Karena kami tidak ingin menimbulkan rasa diskriminasi untuk orang yang baru pulang. Itu nanti bisa ditambahkan di diskusi. Kedua, kami melakukan edukasi melalui media sosial tidak mungkin kami melakukan sosialisasi, jadi menggunakan grup-grup wa. Kemudian yang paling penting bagi kami di desa adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi Pandemi ini. Seperti penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah dan tempat ibadah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian masing-masing dukuh membentuk satuan tugas dan relawan. Pemberdayaan yang kami lakukan adalah optimalisasi lembaga yang ada di desa. seperti RT untuk mengondisikan dan kader untuk pendataan didukung jaga warga, relawan covid.

Karena ada riwayat kontak dengan PDP, satu keluarga harus melakukan karantina mandiri. Sekitar 160 kepulungan kita tidak menggunakan anggaran 1 rupiah pun, ini kami

sukarela. Kita menghadapi ini dengan perjuangan bersama-sama dengan masyarakat dan responsnya luar biasa. Waktu itu ada keluarga yang harus melaksanakan isolasi mandiri. Di desa kami tidak terjadi persekusi kepada keluarga yang memiliki riwayat kontak dengan PDP. Warga kami malah gotong rong agar isolasi mandiri berjalan baik dari logistik, APD dan lain-lain. Dan ini dicukupi oleh warga sekitar. Kami juga dari desa ada anggota yang sifatnya yang dikumpulkan dari masyarakat, karena kami tidak mungkin menganggarkan untuk semua hanya untuk yang memiliki riwayat kontak dengan PDP. Untuk yang pemudik kami tidak memberikan untuk itu, karena niatnya pulang menjadi tanggung jawab keluarganya. Sampai hari ini kami sudah mengeluarkan untuk BLT. Jadi di Kulon Progo jumlah penerimanya akan melihat serapan masing-masing desa. Di desa kami hanya 22 orang yang mendapatkan karena kemampuan keuangan. Kami juga ingin menggaris bawahi bahwa ada beberapa permasalahan di BLT dana desa. karena dalam penanganan Covid-19 antar lembaga pemerintah harus satu haluan. Misalnya prioritas penerima versi Kemensos dan Kemendes berbeda. Versi Kemensos bagi masyarakat yang paling prioritas dapat di danai dengan APBN kemudian kategori berikutnya akan di danai APBD provinsi, kabupaten kemudian baru sebagai backupnya APB desa. Masyarakat itu kan sensitif sekali jika berkaitan dengan BLT yang membuat berat kami di pemerintah desa. Karena sudah masuk kategori-kategori tadi akhirnya yang mendapatkan BLT dana desa bukan yang prioritas. Tetapi tetap bisa kami sampaikan.

Untuk perkembangan hari ini, program jaring pengaman sosial sudah ada beberapa. Sampai hari ini kami melakukan pemetaan sosial dengan menggunakan data kemiskinan yang kita kelola bersama-sama dengan pendamping dari dinas sosial. Yang belum dapat sama sekali masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kita sampai hari ini masih ada yang dalam proses pembuatan kartu KKSnya. Sembako yang akan diberikan dari bulan April sampai dengan Desember akan ada 9 kali 200 ribu sama dengan BLT dana desa. ini ada 215 penerima manfaat. Artinya Covid-19 memberikan dampak ekonomi, sosial kita bergotong royong juga seperti APBD Provinsi, Kabupaten. Data kami dapat dari Musdes kemiskinan yang belum terakomodir bantuan apa pun yang diusulkan setiap RT. kemudian kami usulkan ke Dinas Sosial dan disusun sesuai prioritasnya masing-masing. Di Kulon Progo data awalnya nanti akan dari dinas sosial, kemudian kita verifikasi di desa. Mungkin seperti itu dulu nanti bisa dilanjut dalam diskusi.

Shabia

Terima kasih banyak Mas Sugeng, tadi sudah memaparkan dengan sangat rinci terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan Desa Karang Sari. Tadi mulai dari penanggulangan pemudik, swadaya masyarakat dalam membantu ODP atau yang harus isolasi mandiri. Mas Sugeng juga sudah menceritakan kendala dalam bidang dana desa, sudah ada antusiasme dalam PKTD tetapi malah ada pagebluk ini. Membuat semangat terhenti dan ada semacam ke pusingan untuk mencari solusi dari sana. Saya sendiri terpikir satu pertanyaan tetapi mungkin nanti bisa di arahkan ke teman-teman terlebih dahulu. Karena waktu juga masih berjalan, kita lanjut ke Pak Sukasmanto. Kepada Pak Sukasmanto tadi dari level kabupaten dan Desa Karang Sari juga sudah menjelaskan di level desa. Dan kita tahu desa memiliki prioritasnya masing-masing dan masalah-masalah ini terjadi karena luput diantisipasi oleh pemerintah pusat di surat edaran maupun Permen. Bagaimana Pak Kas sebagai peneliti yang fokus pada isu perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemudian mengkritisi regulasi, kebijakan dan implementasi terkait perencanaan dan penganggaran terkait Covid-19. Mungkin bisa diberikan sedikit pemaparan Pak Sukasmanto, silakan.

Sukasmanto

Baik terima kasih, karena kedua pembicara sudah menyampaikan data dan fakta di lapangan saya juga akan menyampaikannya. Saya sebagai peneliti dan juga terlibat kegiatan-kegiatan di lingkungan pribadi termasuk mendorong pemerintah desa untuk cepat merespons. Karena dampak Pandemi ini awalnya hanya di kota, waktu itu kita hanya menonton di televisi melihat di Jakarta seperti itu, di kota besar seperti itu. Tetapi kemudian, kok lama-lama dampaknya di desa semakin terasa. Apa lagi ini ada mudik kemudian ada orang kehilangan pekerjaan di kota dan balik ke desa. Ini saya berpikir desa harus siap melakukan berbagai hal karena dampak ke desa nanti jauh lebih besar. Dampak kesehatan dan ekonominya juga sangat luar biasa. Tadi Mas Sugeng sudah menjelaskan sudah ada yang mudik 200an lebih dan semuanya kehilangan pekerjaan dan berharap di desa ada kehidupan baru yang bisa ditata kembali.

Pandemi ini ada dampak yang langsung terasa dan ada yang baru nanti terasa. Ada baiknya kita berpikir mitigasi terhadap wabah ini. Salah satu yang menggelisahkan, ini

saatnya panen satu bulan ini sudah mulai ada di desa-desa. Di saat yang sama ini juga ancaman kemarau panjang. Covid-19 ini tidak hanya itu tetapi dampak sosial, desa harus tergoth-goth sebagaimana yang diceritakan Mas Sugeng, ini juga di alami desa-desa yang lain. Tetapi dampak ekonomi yang bisa kita lihat. Pengangguran, kemudian aktivitas produksi menurun dan bahkan pertanian. Ini perlu terobosan untuk petani bisa tetap bekerja, tukang bisa tetap bekerja karena tukang-tukang di desa beda dengan di kota. Ini perlu diperhatikan di desa supaya kehidupannya tetap ada yang bisa berjalan normal. Kemudian pengangguran di desa meningkat, ya tadi arus balik pekerja dari kota yang di PHK. UKM juga sama karena pasarnya di kota daya beli menurun.

Pandemi ini juga punya dampak di perencanaan dan penganggaran desa. tadi sekilas kita sudah mendapat cerita dari Pak Toro dan Mas Sugeng. Tetapi sebenarnya jika kita dudukan secara konsep bahwa ada atau tidak instruksi dari pemerintah pusat baik melalui regulasi berupa peraturan menteri atau surat edarannya. Desa sebenarnya punya kewenangan untuk merespons Pandemi Covid-19. Itu melekat di desa untuk melakukan berbagai hal untuk menanggulangi ini. Kewenangan yang dimiliki, untuk mengubah anggaran hanya saja birokrasi ini menjadi momok yang menakutkan. Di desa saya sampai hari ini malah belum ada kabar berapa yang akan dapat BLT dana desa, pendataannya sudah di lakukan atau belum, belum ada kejelasan. Perubahan APB desa juga belum di sahkan, sampai hari ini. Seharusnya ini tidak menjadi masalah ketika kewenangan desa dipahami secara untuk.

Desa memiliki kewenangan, tetapi yang muncul sekarang masih terkesan pasif dan lamban dan menunggu. Menunggu sampai terasa baru melakukan, ini membutuhkan langkah antisipatif dan tidak mudah. Butuh pendataan, duduk bersama, berpikir bersama dan ini menjadi sulit karena harus jaga jarak. Saya sudah libur rapat RT beberapa bulan, rapat dusun sudah hampir tiga bulan karena terakhir satu bulan sebelum Pandemi sampai sekarang belum rapat lagi. Akhirnya kita siasati dengan banyak cara. Ini karena belum mampu menerjemahkan kewenangan desa, terbelenggu regulasi menunggu tadi. Banyak desa yang masih menunggu, pokoknya selama pemda belum memberikan arahan belum mau bergerak. Sementara warganya sudah ada yang terdampak, harus menyiapkan ruang isolasi, memenuhi logistiknya. Sementara APB desanya belum bisa diubah sehingga tidak bisa dipakai. Memang ketika hidup di komunitas yang modal sosialnya tinggi ini bisa tidak terlalu terasa. Seperti di tempat saya dusun sudah kompak, tetapi kalau di wilayah yang

pokoknya harus desa yang mengurus itu repot sekali.

Kemudian memang gagap menghadapi bencana karena pasti mendadak tidak bisa di prediksi. Tetapi sebenarnya, jika ada ini apa yang harus di lakukan. Ini harus dipikirkan pada saat awal. Kurang mempertimbangkan risiko dan mitigasi dari bencana. Kalau kita lihat di konsepnya bahwa perencanaan APB desa dan perencanaan desa. sebenarnya dengan dasar itu sudah bisa melakukan itu tanpa harus menunggu. Kemudian hambatan birokrasi penganggaran desa dan sistem keuangan. Mungkin birokrasi bisa kita atasi dengan pemerintah desa yang solid bisa merespons. Tetapi sistem keuangan desa yang dibangun oleh pusat ini menghambat proses. Tadi Pak Sugeng cerita kalau DD cermin pertama sudah cair dan sudah dipakai. Kemudian ini harus refokusing dan realokasi tetapi belum cair. Ini sama di tempat saya termin kedua belum cair laporan sudah selesai. Masyarakat sudah bertanya-tanya karena pemberitaan yang masif, ini menjadi riuh sekali di desa. APB desa baru saja ditetapkan. Ada yang Maret baru ditetapkan tetapi sudah harus berubah. Kemudian DD tahap 1 belum cair dan laporan DD tahap satu belum rampung. Padahal harus ada dananya dulu baru bisa menjalankan beberapa program untuk penanganan Covid-19.

Dampaknya bagi penganggaran desa, sebenarnya tadi kita sudah banyak cerita. Jadi harus mengalokasikan 25%-35% dari dana desa untuk BLT. Ini bisa jadi desanya tidak perlu mengalokasikan bisa jadi kebutuhannya lebih dari ini. Itu bisa terjadi misalnya pendataan DTKSnya tidak maksimal. Sehingga yang terkover program-program jaring pengaman sosial sedikit sementara jumlahnya banyak. Ini mau dilakukan seperti apa? Tadi Pak Sugeng menceritakan terpaksa meminta ke provinsi dan kabupaten untuk bisa mengkover jaring pengaman ini. Kemudian ada program padat karya tunai, walaupun ini sudah dari awal aturan ini ada. Hanya SE itu menegaskan boleh dipakai untuk itu, sebenarnya tidak perlu karena sudah ada di situ. Kemudian di kegiatan pencegahan dan penanganan tanggap darurat Pandemi ini. Rejim keuangannya bilang tidak boleh dipakai kalau tidak dianggarkan di situ. Ini sama Pak Sugeng juga cerita 1 rupiah pun belum dikeluarkan. Sama dengan di tempat saya pak. Sudah berkali-kali penyemprotan disinfektan dananya dari komunitas untung ada di komunitas yang modal sosialnya tinggi kalau tidak bisa celaka. Melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran. Jadi refokusing ada tiga sektor itu. refocusing harus dibarengi realokasi. Pertanyaanya ada tidak yang di realokasi, karena bukan sesuatu yang mudah. Tetapi harus dibicarakan karena

harus ada yang dikurangi. Selanjutnya berjibaku mengatur *cash flow* keuangan desa tadi, ya apa kabar pencairan dana desa? ini masyarakat sudah minta BLT tetapi dana desanya belum cair, sehingga harus mengerem pengaturannya.

Dari sisi regulasi banyak yang terlibat. Misalnya kalau kita lihat dari sisi Menteri Keuangan bisa mendorong transfer. Kemudian, menteri desa dan ada juga menteri dalam negeri mendorong dan memberikan instruksi kepada gubernur kemudian bupati tentang DD dan perubahan APB desa. Jadi desa banyak yang merebutkan semoga tidak membuat pusing. Tapi pada prinsipnya desa dalam membuat kebijakan dipengaruhi banyak hal. Kemudian perubahan APB desa. Jadi kalau yang saya lihat yang digunakan banyak pihak masih mengasumsikan kondisi normal. Karena hanya meminta untuk penggeseran antar bidang atau sub bidang. Jadi masih penggeseran saja, masih dalam asumsi normal. Maka perubahan APB desa hanya bisa dilakukan sekali, ini regulasinya berbicara seperti itu. Tadi Pak Toro bercerita di situ, beruntung belum melakukan perubahan APB desa karena hanya bisa dilakukan sekali. Tetapi ada pengecualiannya, di SE Kemdes juga masih sama masih dalam kondisi normal bisa juga dalam kondisi wilayah yang luar biasa.

Catatan saya, kalau ini masih dianggap situasi normal maka hanya bisa dilakukan satu kali. Tetapi kalau ada keadaan luar biasa diatur dengan Perbub sehingga bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ketika suatu kabupaten sudah KLB ini harus ditetapkan supaya APB desa bisa dirubah tidak hanya satu kali. Tidak segera diubah karena takutnya hanya sekali dapat diubah, kegamangan ini membuat ini terjadi. Karena kita juga tidak bisa memastikan proses-proses yang harus di lalui. Kemudian di sisi perencanaan walaupun jangka pendek untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 belum terpikir perencanaan ke depan. Padahal kita harus bisa berpikir jangka pendek dan juga jangka panjang. Perencanaan desa memang harus mau tidak mau karena Pandemi ini sudah memberi dampak maka kita juga harus menyiapkan perubahan dengan mereview dan merevisi perencanaan desa. Terutama RKP dan RPJM desa karena pertama isu strategis di desa sudah bergeser dengan adanya Pandemi ini. Ada yang bergesernya sangat signifikan, ada yang tidak signifikan. Karena dampak Pandemi ini pada ekonomi luar biasa. Sehingga ini harus menggeser strategi desa. kedua, sendi-sendi kehidupan masyarakat desa sudah berdampak. Ketiga ada perubahan data dan informasi serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan desa. Terutama asumsi tentang keuangan desa, sumber keuangan desa. Sekarang DD sudah digunakan 25%-35 % untuk BLT, kemudian nantinya tahun depan

dengan ekonomi yang seperti itu APBN pasti juga akan drop. Maka alokasi dana desa juga akan turun, bagi hasil dengan kabupaten akan turun, DD akan turun. Harus kita antisipasi dari sekarang dampak-dampak ini. Sementara di masyarakat ekonominya kegiatan produksinya juga melemah, kemiskinan meningkat dan lain-lain. Jadi ini yang membuat diskusi bulanan ini sembari kita melakukan pencegahan dan penanganan juga harus ancang-ancang untuk mengubah perencanaan desa ke depan.

Perubahan RPJM desa ini sudah pasti dilakukan karena sudah banyak hal yang membuat dia harus berubah. Kalau di peraturan menteri kan ada syarat-syarat perubahan RPJM desa. Dan ini semuanya sudah terpenuhi dan mau tidak mau memang harus melakukan perubahan. Menarik yang ingin saya sampaikan, isu-isu strategis dalam perencanaan desa peka pandemi. Pertama penurunan kapasitas keuangan desa. Kedua, penurunan daya beli masyarakat. Ketiga, kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Di saat seperti ini penting untuk kebutuhan pangan di desa itu berapa, desa bisa menghasilkan panen berapa. Supaya hasil masyarakat harus dijual keluar atau ditahan di desa untuk cadangan pangan di desa, ini harus dilakukan segera. Karena kalau Covid-19 ini berlanjut, tiga bulan lagi permasalahan pangan akan muncul. Ini yang harus diantisipasi jangka pendek dan jangka panjangnya harus memperkuat produksi pangan dan pola pengelolaan masyarakat. Ketiga kesehatan masyarakat. Kemudian penguatan data dan informasi desa. Sekarang banyak kegamangan karena tidak memiliki data dan informasi. Selanjutnya peningkatan jumlah warga miskin. Berikutnya jumlah pengangguran juga meningkat. Sektor usaha informal dan UMKM juga terpuruk. Kemudian penguatan modal sosial masyarakat. Dan yang paling penting lagi mitigasi bencana alam dan non alam.

Catatan akhir untuk kita lanjutkan nanti diskusi. Kita juga harus mengingat program-program jaringan pengaman sosial yang ada, ibarat balsem ini bisa meredakan sebentar tetapi kita harus ingat ini hanya jangka pendek. Misalnya BLT itu hanya tiga bulan, kemudian bantuan-bantuan sembako itu juga beberapa bulan saja. Ini harus disiapkan dan antisipasi untuk jangka lebih panjang lagi. Selanjutnya masyarakat harus aktif mengawasi implementasi program ini supaya tidak ada kasus-kasus. Tetapi yang paling penting di penyaluran bantuan supaya tidak ada konflik horizontal antar warga dan warga dengan pemerintah desa. ketiga, dalam merespons Pandemi Covid-19 kita kembalikan konsepnya bahwa desa memiliki kewenangan untuk banyak hal. Untuk membuat program ekonomi di desa. juga dapat merespons di anggaran, refocusing dan

relokasi. Kemudian harus menyiapkan juga desain ulang perencanaan dan penganggaran dana desa, karena tadi asumsi-asumsinya berubah sehingga strateginya berubah. Selanjutnya review dan revisi RPJM desa, tidak harus sekarang tetapi ini harus segera dilakukan karena masalahnya sudah di depan mata dan dampaknya juga luar biasa. Itu sebagai catatan akhir yang bisa saya sampaikan selanjutnya bisa kita diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Bia.

Shabia

Baik terima kasih banyak Pak Sukasmanto atas pemaparan dan merespons dua pemaparan sebelumnya yang sangat runut serta sangat menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Pak Sukasmanto menganggap bahwa terkait perencanaan dan penganggaran desa juga harus mengantisipasi tidak hanya dalam tahap darurat namun juga jangka panjang bagaimana. Bahkan untuk memperpanjang keadaan darurat ini, karena kita sendiri tidak tahu Pandemi ini akan berakhir kapan. Dan tentunya yang terjadi di skala mikro tidak lepas dari yang terjadi di dalam makro. Karena kita sudah banyak menonton berita dan menyaksikan daya beli masyarakat menurun, perekonomian nasional juga sedang minus. Sehingga harus dikritisi lebih lanjut lagi. Kita lanjutkan diskusinya dengan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan lewat Zoom dan Facebook.

Tanya-Jawab

Shabia

Ada pertanyaan pertama dari Pak Haris dan Pak Marten Buton. Pak Haris ingin bertanya kepada Pak Kurniantoro, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempercepat pengalihan anggaran untuk mendukung Covid-19 pada praktiknya di desa yang sering ada keterlambatan administrasi. Khususnya dalam input anggaran sistem keuangan desa sementara kebutuhan tersebut sangat mendesak. Kemudian bagaimana kabupaten melakukan langkah-langkah strategis agar terjadi sinergi yang baik dengan pemerintah desa. Karena kebingungan banyak regulasi di dalam tataran desa yang dibuat pemerintah pusat. Ini pertanyaan pertama untuk Pak Kurniataro, silakan ditanggapi.

Kurniantoro

Terima kasih, pertanyaan ini bagus sekali. Pertama bahwa untuk mempercepat

pengalihan anggaran. Tadi saya cerita kalau kemudian harus melakukan perubahan anggaran itu prosesnya terlalu panjang karena harus ada prosedur yang harus dilalui. Kemudian kita juga harus mengamankan dengan mengubah Perbubnya terlebih dahulu tentang pengelolaan keuangan desa, harus musdes dan lain-lain. Makanya ini menggunakan model penggeseran anggaran dan melakukan perubahan penjabaran anggaran. Itu bisa cepat bisa langsung diuangkan tanpa harus bertele-tele. Sekalipun itu ada syaratnya harus dilaporkan kepada BPD dan nanti pas perubahan bisa disesuaikan.

Kedua, memang desa itu dari awal sudah kebingungan. Dalam artian ada banyak sekali aturan dan berbeda-beda serta tumpang tindih. Yang menjadi masalah adalah di desa menjadi sulit untuk menangkapnya. Dalam hal ini kita, sebelum SE itu turun kita sudah melakukan himbauan kepada desa untuk melakukan penanganan dan yang paling darurat apa, pembiayaannya bagaimana, kalau kurang diambilkan dana. Kita melakukan koordinasi, sekalipun kita lakukan melalui media sosial. Syukur pada kondisi sekarang ini media sosial berperan besar sehingga mempermudah komunikasi. Kita juga sampaikan jika kebingungan, kok ini hanya untuk memenuhi seperti ini SE No.8 dan No.11 kemudian meminta untuk dilaksanakan perubahan APB desa. Ini kan tidak perlu dengan perubahan APB desa, apa lagi di Bantul kebetulan anggarannya besar. Desa-desanya di Bantul kurang dari 40% dari seluruh APB desa, jadi dana desanya termasuk kecil dibanding seluruh konstruksi APB desa. Sehingga pembiayaan dari sumber yang lain sudah mencukupi. Tetapi kemudian kalau ada pengharusan dari Permendagri maka harus mengubah sedemikian rupa. Ketika ada perintah di SE itu untuk melakukan perubahan di APB desa, kita memberikan jawaban kepada desa bahwa jangan melakukan perubahan APB desa terlebih dahulu.

Kalau yang diperlukan desa itu cukup dengan penggeseran lakukan itu saja. Bisa cepat dan kemudian tidak bertele-tele. Dan baru setelah Permen itu keluar mewajibkan perubahan APB desa dengan perubahan bidang dan sub bidang itu maka baru dilakukan. Dan ini pun kita siapkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sukasmanto. Kami juga melakukan pengamanan dengan mengubah Perbub DD, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Karena memang APB desa hanya bisa dilakukan satu kali kecuali keadaan bencana dan itu ditetapkan oleh bupati. Keadaan bencana itulah yang kita terjemahkan di dalam perubahan tentang pengelolaan keuangan desa. dan juga dilengkapi dengan surat keputusan bupati tentang penetapan keadaan bencana. Saat ini pendampingan terus kami

lakukan sehingga kemudian dari musdes sampai dengan perubahan APB desa sehingga kemarin sudah berjalan semuanya dan harapannya minggu depan ini perubahan sudah bisa dilakukan. Demikian.

Shabia

Terima kasih Pak Kurniataro semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Haris dan Pak Marten Buton. Ini ada sedikit input dari Mas Prabu untuk Kulon Progo katanya penyaluran tunai sudah dilakukan di 28 kelurahan dari 87 kelurahan. Ini sedikit informasi apa bila teman-teman belum mendapatkan informasinya. Kemudian pertanyaan kedua, dari Ibu Dwi Astuti untuk Mas Sugeng dan Pak Kurniantoro tetapi ini dijawab terlebih dahulu oleh Mas Sugeng. Apakah ada persoalan pemberdayaan dan pengorganisasian di tingkat desa. Ketika desa menjadi tanggap Covid-19 kalau tim relawan sesuai SE No.11 tahun 2020 memang sudah jelas dan tadi sudah disampaikan Mas Sugeng ada pemaksimalan fungsi juga yang sudah ada, misalnya duku. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana aspek pengetahuan dan keterampilannya relawan mengingat persoalan yang ditangani sekarang bukan hanya dalam tataran medis atau penyakit. Bentuk-bentuk pekerjaannya juga baru apakah ada masalah atau kendala?

Sugeng

Terima kasih menjawab pertanyaan Bu Dwi Astuti terkait pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat serta bagaimana memaksimalkan fungsi lembaga? Dalam praktiknya kami membuat tim inti ada 22 orang yang kita fungsikan sebagai tim utama/satgas. Ini kalau mungkin SE itu tidak ada, kami memfungsikan satgas untuk memproduksi materi-materi edukasi yang kita juga bekerja sama dengan Puskesmas. Materi akan disampaikan baik ke pemudik. Untuk mengantisipasi mungkin ada RT yang kurang responsif sehingga ada warga jaga warga yang responsif artinya pengoptimalisasian. Aktivistis di desa itu kan sudah terpetakan, sehingga kita sudah tahu masing-masing personel. Itu kita rekrut sebagai relawan ataupun satgas. Jadi kalau produksi materi edukasi bekerja sama dengan forum pemuda penggerak dan bekerja sama dengan tim Covid-19 dari Puskesmas. Untuk dipelajari tim sendiri dan masyarakat melalui media sosial maupun dicetak. Mungkin itu teknis yang kami lakukan.

Shabia

Baik itu tadi sudah dijawab dari Mas Sugeng terkait dengan teknis di lapangannya

semoga menjawab Bu Dwi Astuti. Kemudian pertanyaan ketiga bisa dijawab oleh seluruh narasumber, mungkin Pak Kasmanto terlebih dahulu menanggapi. Ini sebenarnya sudah banyak dijawab oleh narasumber terkait kendala seperti apa yang di alami Pemdes dan Pemda dalam upaya melaksanakan SE. Tetapi mungkin yang mungkin tadi belum dieksplorasi lebih dalam itu, tadi kan ada masukan hal-hal yang belum dilakukan bagi desa, kabupaten tetapi ini Mas Gagah Pramono bertanya kira-kira apakah memungkinkan ada masukan tertentu yang ingin disampaikan ke pemerintah pusat. Karena bapak-bapak di sini memiliki pengalaman di tingkat daerah dan desa masing-masing. Mungkin ini terkait dengan harapan untuk pemerintah pusat. Silakan mungkin bisa dari Pak Kasmanto kalau Pak Sugeng dan Pak Kurniantoro juga mau menanggapi silakan.

Sukasmanto

Baik saya menanggapi dari Mas Gagah Pramono. Sebetulnya saran untuk kebijakan terutama kepada pemerintah pusat. Kebijakan yang dibangun ini harus dilandasi oleh konsep bahwa desa mampu memiliki kewenangan itu. Saat Pandemi ini seharusnya kebijakan pusat hanya mendorong saja. Desa kemudian menggunakan kewenangannya untuk menangani Pandemi Covid-19 ini dampaknya sekarang jangka pendek maupun jangka panjang. Teknisnya kan dengan bisa turun menjadi perubahan tadi penganggarannya jangka pendek APB desa tahun sekarang, tahun depan kemudian di perencanaannya. Sekarang ini kan kita seolah-olah terbawa ke SE Covid-19 ini. SE ini hanya bantuan tiga bulan saja April, Mei dan Juni. Tetapi hiruk pikuknya luar biasa, padat karya sudah ada sejak dulu. Kemudian upaya kesehatan sudah otomatis menjadi kewenangan desa. Harusnya didorong tolong desa lakukan kewenanganmu untuk mengatasi dampak Covid-19 ini. Kalau pandangan saya seperti itu, desa tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan. Kalau saya justru angkat topi di Bantul, Pak Wahyudi itu begitu ada Pandemi langsung bergerak. Sumber dananya mungkin dari PADes yang tinggi. Respons cepat ini, memperlihatkan kesadaran kewenangan yang dimiliki desa. Kalau melakukan itu tidak ada salahnya kan, menyemprot tempat ibadah secara administratif bisa dipertanggung jawabkan. Balsem tiga bulan yang kita lihat, kemudian ke depannya ini kewenangan desanya.

Misalnya desa tidak terlalu terdampak, tetapi melakukan upaya kedaulatan pangan atau ketahanan. Dengan mendata panen atau jumlah petani yang masih produktif, berapa lahan yang masih bisa dioptimalkan untuk mencukupi pangan di desa. Jadi caranya

bagaimana pusat kebijakan yang dikeluarkan tetap mengakui kewenangan yang ada di desa. Mendorong saja supaya desa menggunakan kewenangannya itu. mungkin itu sementara jawaban saya. Kalau Pemda benar apa yang dilakukan oleh Pak Toro tadi, kementerian memberikan perintah yang jelas untuk dilakukan. Tetapi tidak semua Pemda secepat Bantul, ini apresiasi. Untuk mengatasi kebingungan tadi, Pemda membina dan mengawasi seperti yang sudah dilakukan tadi. Seperti itu terima kasih.

Shabia

Terima kasih Pak Sukasmanto. Mungkin Pak Kurniantoro atau Mas Sugeng ingin menambahkan.

Kurniantoro

Menambahkan sedikit, terkait dengan masukan untuk pusat. Sebenarnya saya itu ingin pusat itu konsisten apa yang sudah termuat dengan UU Desa. Jadi kalau memang desa sebagaimana tadi disampaikan Pak Sukasmanto bahwa desa itu punya wewenang. Biarlah desa diakui keberagamannya, jadi tidak semua desa dianggap sama. Kebijakan dari SE, SE itu kan semua desa dianggap sama dan masalah yang sama. Sehingga diberikan kebijakan yang sama untuk semua desa. padahal bagi desa yang tidak tersentuh oleh Covid-19 harus memberikan BLT dan lain-lain untuk apa. Menurut saya malah cukup memberikan informasi penanganan korona disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa. Jadi Bantul tidak pernah menentukan desa harus sekian persen untuk penanganan Covid-19 atau tidak pernah mengatakan desa harus membeli APD atau pencuci tangan. Semua diserahkan ke desa dengan anggaranmu sesuai dengan yang dibutuhkan desa. Ini yang seharusnya dilakukan oleh pusat bahwa desa berikan keleluasaan untuk menentukan sendiri. Hanya memberikan petunjuk bahwa korona ini bisa diantisipasi dengan ini-ini-ini. Pilihan kepada desa untuk mengambil kebijakan sendiri.

Sugeng

Tambahan terkait saran untuk pemerintah pusat sebenarnya senada dengan Pak Sukasmanto dan Pak Toro. Bahwa kebijakan seperti SE, BLT, tadi sudah kami sampaikan di Karang Sari kalau dilakukan seperti itu tidak mungkin. Karena anggaran kita sudah

terserap. Kalau misalnya 30% DD itu untuk itu, kita 30% sudah tidak ada. Harusnya di kembalikan ke dasarnya subsidiaritas dan rekognisi harusnya pulang kembali kepada desa seperti itu. Kami akan menakar masing-masing desa, kalau di Bantul dana desa itu hanya bagian kecil dari postur APB desa. tetapi untuk kami desa-desa di Kulon Progo karena APB desa kecil pendapatan asli desa kecil, bagi hasil kecil. Di desa kami saja untuk DD itu sudah hampir 60% total APB desa. Kalau DD sudah dipaku-paku seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kehilangan asas subsidiaritas dan rekognisi. Sekian.

Shabia

Baik semoga pertanyaan dari Pak Gagah Pramono terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Ening Vero terkait APB desa perubahan apakah ada angka maksimal? Dan apabila kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan apakah akan mendapatkan suport dari kabupaten? Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Kurniantoro dan kalau mau ditambahkan oleh Pak Kas dan Mas Sugeng.

Kurniantoro

Jadi kalau untuk Bantul tadi sudah kami jelaskan. Bahwa kami tidak menentukan berapa porsi yang dipergunakan. Artinya kami tidak membatasi maksimal berapa, ADD kami sangat cukup untuk menangani Covid-19. Karena 30% APBD kami cukup untuk PP 11. Itu ada banyak sisa untuk penganan ini. Sehingga kami bebaskan, sejauh ini tidak ada permintaan dari desa untuk tambahan. Bahkan desa bisa memberikan bantuan operasional untuk penanganan korona ini untuk dusun. Jadi dusun dibiayai oleh desa untuk operasional penanganan. Kalau di Timbulharjo bahkan permintaannya bukan hanya sampai ke dusun bantuan operasional penganan korona ini, permintaannya sampai ke RT. Kemarin RT ditotal sampai 600 juta terlalu banyak, sehingga operasionalnya diberikan kepada pedukuhan. Jadi kami tidak menentukan, desa sendiri yang menentukan. Dan sejauh ini tidak ada desa yang meminta bantuan ke kabupaten artinya kami anggap desa sudah cukup. Demikian.

Shabiah

Dari Pak Kasmanto atau Mas Sugeng ada tambahan?

Sukasmanto

Saya ada tambahan, sesuai pertanyaan. Jadi perubahan APB desa dari level paling rendah adalah pergeseran bidang-sub bidang. Itu tidak ada batasan maksimal, persentasenya boleh berubah berapa tidak ada. Artinya kemudian apakah akan mendapat bantuan dari kabupaten kalau memenuhi. Prinsip di pergeseran ini, menggeser pos anggaran tanpa mengubah dananya. Sehingga kalau ada keputusan, kemudian bisa diajukan ke kabupaten. Tetapi ini juga skemanya sudah di Pagu. Kemudian kalau analisis satu kabupaten seperti Pak Toro tadi sampaikan, kalau diprediksi desa-desa akan kekurangan. Ini kabupaten bisa mengeluarkan kebijakan untuk menambah bantuan. Tetapi prinsipnya kalau pergeseran tidak mengubah jumlah penerimaan yang dianggarkan. Begitu saja tambahan saya.

Shabia

Jadi tadi sudah terjawab ya terkait dengan pergeseran tidak ada persentase maksimal hanya berupa pergeseran bukan secara menyeluruh. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Sugeng, sejauh mana partisipasi masyarakat miskin pada saat menentukan data kemiskinan itu sendiri? Saya membaca pertanyaan ini tentang bagaimana partisipasi secara inklusif dan demokratis dari kelompok rentannya sendiri. Silakan Mas Sugeng.

Sugeng

Data dari DPKS umum yang diusulkan oleh kader desa, kedukuhan, BPD. Itu akan disaring di tingkat desa, kita menggunakan SE Covid tetapi kalau kita praktikkan sangat sulit. Artinya nanti juga menyesuaikan tingkat kemiskinan yang ada di desa. Nanti akan ada pembobotan, kita bekerja sama dengan Dinsos untuk menentukan itu. Karena sampai saat ini kami di desa tidak bisa menentukan sendiri. Kami belum sampai ke sana untuk menentukan tingkat kemiskinan di desa itu siapa, masih mengacu pada kelompok rentan yang selalu kita ikutkan dalam Musdes. Jadi Musdes sekaligus menyetujui, ada kelompok rentan KDD (Kelompok Difabel Desa). Begitu mungkin jawaban saya.

Shabia

Selanjutnya ada dari Mbak Ema Rahmawati terkait BLT dana desa sebenarnya sudah dijelaskan. Tetapi mungkin bisa ditambahkan apakah BLT dana desa cukup efektif akhirnya meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Dan kalau tidak efektif harus dibarengi dengan apa?

Kurniantoro

Kalau bicara efektif tidak efektif, kita sulit untuk menjawabnya. Hanya saja jelas di masyarakat karena covid-19 ini banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja. Termasuk juga warung-warung di pinggir jalan, penghasilannya sangat bergantung pada yang lalu-lalang. Ini tentu saja efektif di dalam desa memberikan bantuan agar dia bisa survive. Kemudian bisa melalui proses untuk berdiam di rumah demi penanganan korona ini. Kalau bagi yang kehilangan penghasilan ini tentu sangat berat sekali kalau harus di rumah tidak bisa bekerja dan tidak memiliki uang. Makanya bantuan ini menjadi penting sekali. Tetapi yang menjadi masalah terkait dengan BLT ini hanya penentuan siapa yang berhak mendapatkan. Dan ini sering menjadi pemicu permasalahan di masyarakat. Seperti itu.

Shabia

Begitu Pak Kurniantoro, Pak Kas atau Mas Sugeng mau menambahkan?

Sugeng

Mau menambahkan sedikit, kami memandang BLT memang efektif, masyarakat membutuhkan uang tunai saat ini. Karena kebutuhan terus harus berjalan tetapi pekerjaan terhenti artinya cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian tidak melulu soal uang, karena peluang kerja juga harus didapatkan. Walaupun pada pandemi ini, pembatasan-pembatasan perlu dilakukan upaya melalui pemberdayaan dan lain-lain. Saya rasa juga perlu sebagai bagian dari upaya memberikan peluang kerja dan peluang kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kira itu saja tambahan dari saya.

Shabia

Baik Mas Sugeng, dari Pak Kas ada tambahan?

Sukasmanto

Kalau melihat efektivitasnya, melihat namanya ini hanya jaring pengaman sosial. Tetapi bukan untuk mengatasi dampak ekonomi, ini dampak ekonomi jangka pendek butuh uang untuk belanja untuk hidup sekian waktu ini efektif. Bagi penerima manfaat. Tetapi kemudian kalau berbicara nanti dampak pandemi ini setelah tidak lagi menerima bantuan langsung. Ini tadi yang saya sampaikan perencanaan harus dipikirkan oleh

pemerintah desa. fasilitasi apa yang bisa dilakukan, program pemberdayaan apa yang bisa dilakukan. Misalnya tidak harus dalam bentuk memberi bantuan tetapi bagaimana inovasi, kreativitas untuk pengeluaran rumah tangga ini bisa berkurang. Misalnya ada gagasan sekarang ini, berkebun di pekarangan sendiri, memakai hidroponik. Ini kan sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran, ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi juga harus dilihat bahwa bantuan-bantuan itu kalau bisa penggunaannya bisa memutar ekonomi di desa. Misalnya butuhnya beras ya membeli dari petani di situ, sehingga uangnya berputar di situ. Jangan malah membeli produk di luar desa yang tidak akan membuat perputaran ekonomi. Ini yang ke depan harus kita pikirkan, bagaimana menggerakkan produksi di masyarakat mungkin dalam jangka pendek dibeli sendiri oleh masyarakat. Supaya ekonominya berputar di desa. Sektor pertanian ini justru saatnya bangkit, kebutuhan pangan pasti akan meningkat apa lagi nanti ada kemarau panjang. Tetapi tadi kalau pertanyaannya efektif? Efektif untuk jangka pendek sesuai dengan tujuannya. Tujuannya kan masyarakat bisa punya uang untuk memenuhi kebutuhan selama masa penanganan Covid-19 ini. Setelah itu baru kita berbicara strategi untuk penghidupan masyarakat. Terima kasih.

Shabia

Terima kasih banyak kepada ketiga pembicara yang sudah dan menanggapi pertanyaan. Kita tiba pada pertanyaan terakhir sebelum nanti saya tutup dan rangkum. Pertanyaan lagi dari Pak Marten Buton kepada Pak Sukasmanto sebagai penutup. Beliau mengandaikan desa rupanya seperti cewek cantik banyak yang melirik bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Banyak kementerian berkepentingan, level daerah pun demikian. Pak Sukasmanto kira-kira apa yang bapak tawarkan tentang konsep yang bisa diadopsi semua pihak sehingga bisa membuat nyaman desa baik dalam perencanaan dan penganggaran. Silakan.

Sukasmanto

Kalau konsep yang saya bisa tawarkan di forum ini sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama kebijakan pusat itu harus mengingat kembali UU desa yang mengakui kewenangan desa. Jadi kembalikan ke situ, kembalikan desa untuk menjalankan kewenangannya agar merespons Covid-19. Tadi yang saya rangkum dari Pak Toro tadi mendorong saja supaya desa menggunakan kewenangannya itu untuk apa saja. Atau justru mensosialisasikan dampaknya bagi ekonomi desa. sehingga desa harus mengambil/

menggunakan kewenangannya. Kemudian, kebijakan-kebijakan yang di keluarkan bisa dioperasikan di lapangan atau tidak? Kalau sudah seperti kondisi sekarang ini ya tadi. Ini harus ada visi yang menjembatani antara kebijakan dan implementasinya. Karena sering kali pusat pokoknya besok ini, besok ini. Teknis operasionalnya seperti itu, jadi butuh jembatan. Ini memang butuh peran kabupaten supaya desa tidak bingung, termasuk juga peran bagi perguruan tinggi untuk menemani desa proses maupun membantu memahami kebijakan secara benar, tidak carut marut seperti sekarang ini. Jadi itu bisa saya sampaikan terkait konsepnya. Bahwa ini memang menarik tapi kembalikan lagi ke bahwa desa memiliki kewenangan, tunjukkan cara desa menggunakan kewenangannya bukan dibajak kewenangannya. Tunjukkan cara desa menggunakan kewenangannya, mengubah perencanaan, anggaran dan lain-lain. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan terima kasih.

Shabia

Terima kasih banyak Pak Sukasmanto. Jadi itu jawabannya kembalikan lagi kewenangannya yang tidak bisa lepas dari karakteristik permasalahan atau potensi di desa itu sendiri. Kita sudah melalui dua jam yang sangat penuh dengan cerita dan pengalaman. Kemudian tuturan-tuturan yang menambah banyak masukkan bagaimana desa merespons SE dan Permendes. Dan juga bagaimana kabupaten bisa membantu desa serta menjembatani dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya melihat dari pemaparan Pak Sukasmanto ada beberapa hal yang harus diperhatikan desa dan institusi supra desa lainnya. Karena kita tidak bisa hanya berfokus pada satu hal. Sementara hal yang sifatnya jangka panjang menjadi terlewat. Sebenarnya agakannya sulit merangkum semua pembicaraan kita karena ada begitu banyak variasi dan materi yang kaya. Tetapi mungkin untuk merefleksikan sedikit ternyata merespons dari surat edaran dan Permendes sulit diterjemahkan. Pada tataran desa pun harus kembali mengingat asas rekognisi dan subsidiaritas. Kemudian harus pintar-pintar mengolah apa yang bisa di atasi. Mas Sugeng tadi juga berbagi cerita desa sebenarnya sudah semangat untuk mengalokasikan PKTD tetapi kemudian ada pagebluk ini.

Sehingga kalau boleh saya rangkum, akhirnya desa juga harus pintar-pintar memosisikan diri. Dan desa harus bisa membaca terkait permasalahannya, tadi terkait konflik horizontal dan prioritas yang tidak cocok dengan langkah-langkah dan lain sebagainya. Pemerintah kabupaten pun harus tetap membantu desa untuk menerjemahkan

kebijakan tersebut. Akhirnya kita kembali ke kewenangan, rekognisi, subsidiaritas dan semangat berdesa. Tentunya ini sulit untuk dilakukan misalkan pagebluk ini tidak ditangani dari pusat. Jadi harapannya bahu membahu di taraf lokal bisa dibarengi dengan pemerintah pusat dan solidaritas dari masyarakat untuk mendukung masing-masing dari kita. Mungkin sekian dulu. Saya sebagai moderator terima kasih banyak kepada Pak Kurniantoro, Mas Sugeng dan Pak Sukasmanto. Saya juga berterima kasih kepada peserta jangan lupa mengikuti diskusi bulanan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, selamat sore.